

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTARKABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010-2017

Arif Maulana¹

1. *Statistisi Ahli Pertama, BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Indonesia*
E-mail: maulana127041@gmail.com

Abstract

One of the problems that still cannot be resolved in Indonesia is the inter-regional inequality. Some regions experience fast economic growth but the other one get slow economic growth. One of the provinces that cannot be separated from this problem is South Kalimantan Province. The purpose of this study was to determine the extent of development inequality between districts/cities in South Kalimantan Province in 2010-2017. This study was conducted using a quantitative descriptive approach using Gross Regional Domestic Product (GRDP) and population data. The analytical tool used is the Williamson Index Analysis and Klassen Typology. The results of the study show that inequality between districts/cities in the South Kalimantan Province is still worrying, showed through the Williamson Index shows the middle and high levels because it is around 0,5. An important finding that should be noticed in this study is districts that have a large dependence on coal mining are in quadrant 2 (high income but low growth) and quadrant 4 (low growth and low income) based on the results of the Klassen Typology.

Keywords: *Williamson Index, Klassen Typology, inequality, Descriptive Analysis, Coal Mining*

JEL Classification: *D63, R11, R12*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pemerintah dan seluruh komponen masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk membentuk lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan hasil pembangunan menjadi sasaran utama. Namun, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi menyebabkan ketimpangan pembangunan antar-wilayah (Andhiani, Erfit, & Bhakti, 2018). Ketimpangan pembangunan umumnya terjadi pada aspek pendapatan, spasial dan sektoral. Petunjuk awalnya adalah golongan kaya semakin kaya sedangkan kaum miskin semakin

miskin. Wilayah maju terus berkembang pesat meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor unggulan yang berkontribusi besar bagi pembangunan (Mopangga, 2011).

Di setiap wilayah penjurur dunia, tidak sulit menemukan kasus ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial ekonomi penduduk. Pada tahun 2011, muncul gerakan protes *Occupy Wall Street* (OWS) yang memiliki slogan *'we are 1 percent not 99 percent'* di Amerika Serikat, sebagai simbol protes mereka kepada sistem kapitalis yang memicu tumbuhnya pendapatan hanya untuk segelintir penduduk di sana (Du Toit, 2015). Banyak negara yang terjebak pada ketimpangan yang lebar dan kasus kemiskinan yang cukup parah. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan menjadi isu penting yang tidak dapat dipandang sebelah mata dan dibiarkan.

Mempertimbangkan pentingnya masalah tersebut, penelitian ini akan menganalisis seberapa besar ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam pembangunan ekonomi, pada umumnya akan mengalami suatu dilema antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Pembagian *output* yang merata tidak dapat dicapai apabila pembagian hasil pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian warga negara. Tidak meratanya pembagian hasil pembangunan akan berdampak kepada ketimpangan antarwarga. Ketimpangan tersebut akan sangat rentan menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya bisa menimbulkan gejala atau konflik nasional (Muttaqim, 2014).

Ketimpangan yang terjadi tidak dapat dihindari akibat tidak terjadinya efek perembesan ke bawah (*trickle down effect*) dari *output* secara nasional terhadap masyarakat mayoritas bahkan sampai saat sekarang (Gama, 2009). Ketimpangan antarwilayah terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, tetapi juga terhadap pembangunan antarwilayah (Sirojuzilam, 2005). Ketimpangan pembangunan antarwilayah timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Daerah yang memiliki sumber daya dan faktor produksi, terutama barang modal (*capital stock*) akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak (Yeniwati, 2013).

Ketimpangan antarwilayah merupakan konsekuensi dari pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antarwilayah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pe-

ngaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dan akan mengakibatkan proses ketidakseimbangan (Todaro, 2000).

Akibat lain yang ditimbulkan dari perbedaan ini adalah kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan jika pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Terjadinya ketimpangan tersebut berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah. Oleh karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antarwilayah juga berdampak terhadap penyusunan kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Sjafrizal, 2008).

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data periode tahun 2010-2017 untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, mencakup data: 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010; 2) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha; 3) Jumlah penduduk; 4) Pertumbuhan Ekonomi. Seluruh data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2018a; Badan Pusat Statistik, 2018b).

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan selatan tahun 2011-2017 adalah Indeks Williamson. Indeks ini dirasa sesuai untuk mengukur tingkat ketimpangan antar daerah. Komposisi utama indeks Williamson yaitu membandingkan tingkat pendapatan perkapita dan jumlah penduduk, yaitu dengan formulasi sebagai berikut (Sjafrizal, 2012).

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum \left((Y_i - Y)^2 \left(\frac{f_i}{N} \right) \right)}}{Y}$$

Keterangan:

- V_w = Indeks Williamson.
 Y_i = PDRB perkapita Kabupaten/Kota i atas dasar harga konstan.
 Y = PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Selatan atas dasar harga konstan.
 f_i = Jumlah penduduk Kabupaten/Kota i .
 N = Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan.

Indeks Williamson (tingkat ketimpangan) yang diperoleh terletak antara 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 0 (nol) berarti ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan semakin rendah atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi regional terjadi secara merata. Jika Indeks Williamson mendekati 1 (satu) maka ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan semakin tinggi serta mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi regional yang tidak merata.

Metode analisis tipologi kelas dengan pendekatan wilayah digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita. Kabupaten/Kota kemudian dibedakan menjadi empat bagian yaitu daerah maju dan tumbuh pesat, daerah maju tetapi tertekan, daerah berkembang cepat/potensial, dan daerah yang relatif tertinggal. Analisis ini bersifat dinamis karena sangat bergantung pada perkembangan kegiatan pembangunan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Cara menggunakan tipologi kelas yaitu dengan formulasi seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1 (Sjafrizal, 2008):

Adapun kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikannya adalah sebagai berikut: (1) Daerah maju dan tumbuh pesat adalah daerah yang me-

iliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, (2) Daerah maju tetapi tertekan adalah daerah yang memiliki PDRB perkapita lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, (3) Daerah berkembang cepat/potensial adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi tetapi tingkat PDRB perkapita lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, (4) Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 1. Klasifikasi Tipologi Kelas

| | $Y_i > Y$ | $Y_i < Y$ |
|-----------|--|---|
| $R_i > R$ | Kuadran 1. Daerah Maju dan Tumbuh Pesat | Kuadran 3. Daerah Berkembang Cepat/Potensial |
| $R_i < R$ | Kuadran 2. Daerah Maju Tetapi Tertekan | Kuadran 4. Daerah Relatif Tertinggal |

Sumber: Sjafrizal, 2008

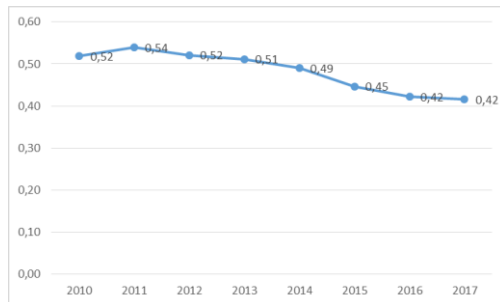
Keterangan:

- Y_i = PDRB perkapita Kabupaten/Kota i atas dasar harga konstan.
 Y = PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Selatan atas dasar harga konstan.
 R_i = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota i .
 R = Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Beragamnya karakteristik antarwilayah menyebabkan adanya ketimpangan antarwilayah maupun antar-sektor ekonomi suatu wilayah. Besar kecilnya ketimpangan PDRB perkapita antarkabupaten/kota memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2010-2017 dianalisis dengan Indeks Williamson. Semakin mendekati 0 (nol) Indeks Williamson menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau dengan kata lain semakin merata, begitu juga sebaliknya. Hasil perhitungan Indeks Williamson disajikan dalam grafik berikut.

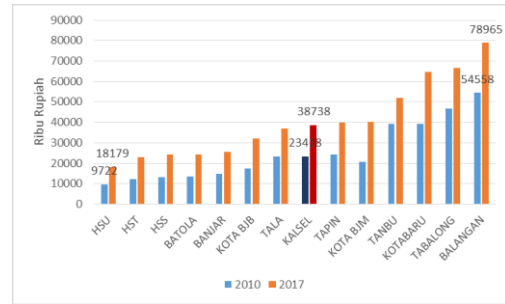


Gambar 1. Indeks Williamson Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Dilihat dari grafik Indeks Williamson tersebut, menunjukkan bahwa ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2010-2017 cenderung menurun. Meskipun begitu, ketimpangan pembangunan antarabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan masih mengkhawatirkan dilihat melalui Indeks Williamson yang menunjukkan level menengah dan tinggi karena di sekitar 0,5.

Selama tahun 2010-2013 Indeks Williamson Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan masuk dalam ketimpangan level tinggi karena melebihi 0,5. Kemudian setiap tahun menunjukkan penurunan sehingga pada tahun 2014-2017 turun ke level menengah karena memiliki Indeks Williamson kurang dari 0,5. Meskipun mengalami penurunan, terlihat masih terjadi ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Apabila dilihat dari Indeks Williamson, derajat ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,4.



Gambar 2. PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 dan 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Berdasarkan PDRB perkapita, dapat dilihat bahwa ketimpangan disebabkan karena beberapa kabupaten yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) pertambangan batubara seperti Kabupaten Kotabaru, Tapin, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Balangan memiliki PDRB perkapita yang sangat jauh lebih tinggi dari rata-rata PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Selatan. Sebaliknya, beberapa kabupaten yang tidak memiliki maupun tidak mengeksplorasi potensi SDA pertambangan batubara seperti Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara memiliki PDRB perkapita jauh lebih rendah daripada rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan PDRB perkapita, penurunan ketimpangan di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2010-2017 ini juga dapat dilihat dari menurunnya rasio PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. PDRB perkapita Kabupaten Balangan (tertinggi) jika dibandingkan dengan Kabupaten HSU (terendah) pada tahun 2010 yang mencapai 5,6 kali lipat menurun menjadi 4,3 kali lipat pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena kabupaten/kota yang memiliki kontribusi ekonomi relatif kecil terhadap perekonomian provinsi mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih cepat dibandingkan daerah yang berproduksi besar, dan sebaliknya. Situasi

tersebut turut berkontribusi pada membesarnya *share* PDRB kabupaten/kota tersebut, sehingga berpotensi mempersempit ketimpangan. Meskipun begitu, masih terlihat jelas ketimpangan yang terjadi yang mana PDRB perkapita Kabupaten Balangan (tertinggi) jika dibandingkan dengan Kabupaten HSU (terendah) pada tahun 2017 masih mencapai 4,3 kali lipat lebih besar.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN BATASAN

Berdasarkan hasil analisis ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di provinsi Kalimantan selatan pada tahun 2010-2017, dapat disimpulkan meskipun mengalami penurunan selama tahun 2010-2017, ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan masih mengkhawatirkan. Hal tersebut bisa digambarkan oleh Indeks Williamson yang menunjukkan level menengah dan tinggi karena berada di sekitar 0,5. Jika dilihat berdasarkan PDRB perkapita, ketimpangan yang masih besar diakibatkan oleh beberapa kabupaten yang memiliki keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) berupa melimpahnya komoditi batubara yang memiliki PDRB perkapita jauh diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat melaksanakan pembangunan secara merata untuk setiap kabupaten/kota agar tercipta kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui peningkatan PDRB perkapita agar ketimpangan pembangunan yang terjadi dapat teratasi.

Temuan penting yang patut dicermati dalam penelitian ini yaitu kabupaten yang memiliki ketergantungan besar terhadap pertambangan batubara berada pada kuadran 2 (daerah maju tetapi tertekan) dan kuadran 4 (daerah

relatif tertinggal) berdasarkan hasil Tipologi Klassen. Sedangkan Kabupaten yang tidak bergantung kepada batubara masuk ke kuadran 1 (daerah maju dan tumbuh pesat) serta kuadran 3 (daerah berkembang cepat/potensial).

Hal tersebut menjadi indikasi untuk kabupaten/kota yang akan meningkatkan potensi ekonominya disarankan untuk fokus ke selain kategori pertambangan dan penggalian. Selain karena tidak semua kabupaten/kota memiliki SDA pertambangan juga karena beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang bergantung pada kategori pertambangan dan penggalian masuk ke daerah maju tetapi tertekan perekonomiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhiani, K. D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 26–34.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2018a). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Selatan 2013-2017 Menurut Lapangan Usaha*. Banjarbaru: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018b). *Tinjauan Produk Domestik Regional Bruto se-Kalimantan Selatan 2017*. Banjarbaru: Badan Pusat Statistik.
- Du Toit, C. . (2015). Discerning urban spiritualities: Tahrir Square, Occupy Wall Street and the idols of global market capitalism. *Verbum et Ecclesia*, 36(1).
- Gama, A. S. (2009). Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik

- Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial (INPUT)*, 2(1).
- Mopangga, H. (2011). Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Trikonomika*, 10(1).
- Muttaqim, H. (2014). Analisis Disparitas Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Aceh Dengan Pendekatan Indeks Ketimpangan Williamson Periode Tahun 2008-2011. *Lentera*, 14(9).
- Sirojuzilam. (2005). *Beberapa Aspek Pembangunan Regional*. Bandung: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. P. (2000). *Economic Development, Seventh Edition*. New York: Addition Wesley Longman, Inc.
- Yeniwati. (2013). Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2(3).